

**PERBANDINGAN REKRUITMEN PDI-PERJUANGAN DAN
PARTAI DEMOKRAT TERHADAP CALEG DPRD PEMILU
TAHUN 2014 DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



KASWAN TRY POETRA

NIM E 111 09 009

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
JURUSAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

SKRIPSI

PERBANDINGAN REKRUITMEN PDI-PERJUANGAN DAN PARTAI DEMOKRAT TERHADAP CALEG DPRD PEMILU TAHUN 2014 DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Politik*

KASWAN TRY POETRA

E 111 09 009

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

JURUSAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi:

**PERBANDINGAN REKRUITMEN PDI-PERJUANGAN DAN PARTAI
DEMOKRAT TERHADAP CALEG DPRD PEMILU TAHUN 2014
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Disusun dan diajukan oleh:

Kaswan Try Poetra
NIM E 111 09 009

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Makassar, 4 Desember 2013

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si

NIP. 19730813 199803 2 001

A. Naharuddin, S.IP., M.Si

NIP. 19731122 2002121 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Politik-Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Ketua Program Studi
Ilmu Politik

Dr. H. A. Gau Kadir, MA

NIP. 195010171980031002

Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si

NIP. 19730813 199803 2 001

HALAMAN PENERIMAAN

Skripsi:

**PERBANDINGAN REKRUITMEN PDI-PERJUANGAN DAN PARTAI
DEMOKRAT TERHADAP CALEG DPRD PEMILU TAHUN 2014
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Disusun dan diajukan oleh:

Kaswan Try Poetra
NIM E 111 09 009

Telah diterima dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Ilmu Politik Jurusan Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Makassar, 4 Desember 2013

**Menyetujui
Panitia Ujian Sarjana**

Ketua : Dr. Muhammad Saad MA (.....)

Sekretaris : A. Naharuddin, S.IP., M.Si (.....)

Anggota : Drs. H. Andi Yakub, M.Si (.....)

Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si (.....)

Ali Armunanto, S.IP, M.Si (.....)

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil a'alam, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul "Perbandingan Rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat Terhadap Caleg DPRD Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Polewali Mandar" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Semoga suri tauladan beliau senantiasa mewarnai segala langkah dan aktivitas kita.

Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk ayahandaku H. Abu Talib yang menjadi inspirator, idola, sekaligus motivator terbesar penulis dalam menempuh pendidikan dan untuk ibudanku Hj. Lismawati yang selalu mengiringi langkah penulis dengan do'a juga Nenekku tercinta Hj. Safiah yang tanpa hentinya bertanya "kapan Sarjana nak" yang selalu memberikan motivasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah membesarkan dan mendidik penulis sampai hari ini dan akhirnya mampu mempersembahkan gelar sarjana ini. Terima kasih atas segala kasih

sayang, kepercayaan dan dukungan baik dalam bentuk moril maupun materi yang tiada hentinya kalian berikan dari penulis lahir hingga sekarang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan memberikan penulis kesempatan untuk membahagiakan dan membalas segala kasih sayang dan cinta kalian. Kepada kakak-kakakku dan adikku tersayang, Taufiq Hari Saputra, SE, Rachmat Dwi Poetra, SE, Risna Haerani, Moch Azhar Budianto, dan keponakanku tercinta Muh. Rafi Azhari semoga dengan selesainya pendidikan penulis di tingkat Universitas menjadi pemacu dan motivasi untuk adikku dalam menyelesaikan pendidikan dan mampu mencapai gelar pendidikan yang lebih tinggi kedepannya. Serta untuk keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas do'a dan dukungannya selama ini.

Pada kesempatan kali ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si sebagai pembimbing I penulis yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama penulisan skripsi, serta Bapak A.Naharuddin, S.IP, M.Si sebagai pembimbing II yang selalu menyediakan waktunya dan tidak pernah lelah, jenuh membimbing dan memberikan arahan kepada penulis. Selain itu penulis juga menyampaikan terima kasih

kepada :

1. Bapak Rektor UNHAS dan Bapak Dekan FISIP UNHAS beserta jajarannya yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan selama menjadi mahasiswa FISIP UNHAS.
2. Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Dr.H.A.Gau Kadir, M.A serta Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, A.Naharuddin, S.IP, M.Si atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan bahkan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Prodi Ilmu Politik sekaligus pembimbing akademik penulis Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si serta seluruh dosen Program Studi Ilmu Politik, Prof. Kausar Bailusy, Prof. Armin, Pak Muhammad, Pak Sukri, Pak Anto, Pak Saad, Ibu Sakina, Ibu Ariyana, Pak Syahrir, yang telah banyak membagi ilmu dan pengalaman-pengalaman kepada penulis selama mengikuti perkuliahan bahkan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Staf pegawai di Jurusan Politik Pemerintahan, Ibu Irma, Ibu Hasna, Ibu Nanna yang telah membantu dan mengarahkan selama proses pendidikan di Prodi Ilmu Politik.
5. Seluruh dosen di lingkungan FISIP dan lingkungan Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu.

6. Bapak H. Ibrahim, HS selaku Ketua DPC PDI-Perjuangan Kab. Polewali Mandar yang telah berkenan memberikan izin penelitian di DPC PDI-Perjuangan Kab. Polewali Mandar kepada penulis. Serta seluruh pengurus dan anggota PDI-Perjuangan khususnya kanda Muhchsin Fattah selaku Wakil Ketua bidang Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekrutmen DPC PDI-Perjuangan Kab. Polewali Mandar yang telah membantu penulis selama proses penelitian. Bapak Erfan Kamil, ST selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Polewali Mandar yang telah berkenan memberikan izin penelitian di DPC Partai Demokrat Kab. Polewali Mandar kepada penulis. Serta seluruh pengurus dan anggota PDI-Perjuangan khususnya Bapak H. Basri AR, SE, PGD.MSY selaku Sekretaris Umum DPC Partai Demokrat Kab. Polewali Mandar yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
7. Bapak Ir. Darwis Ambas (Caleg DPRD Kab/ Kota Dapil I Partai demokrat) dan Aulia Rahman, ST (Caleg DPRD Kab/ Kota Dapil PDI-Perjuangan) terima kasih atas waktu juga kesempatan yang telah diberikan untuk bersedia sebagai informan penulis dalam proses penelitian.
8. Sahabat-sahabatku tersayang Jafar Kasim, S.PT, Ifan Wijaya, S.Kom, Andi Dandi ST, Zulkifli, Aseng Angsur, A. Muh. Muadz,

Ahmad Maulana, dan Idznada yang telah bersedia menjadi teman berbagi cerita dan pengalaman penulis.

9. Teman-temanku di SMAN 1 Polewali, SMPN 1 Polewali, dan SDN 1 Polewali.

10. Saudara-saudaraku di keluarga besar “Smile Community Polman” Imam, Idink, Romo, Farel, Steven, Iccank, Hendra, Aldi, Acci, Cakra, Sigit, Rhamadan, Ewink Bakkul serta senior dan junior lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman kepada penulis.

11. Teman seperjuangan di keluarga besar “Interaksi 09”, Erul, Kahar, Ardi, Adi, Iwan, Tribar, Enal, Sem, Amed, Tamsir, Yudha, Alif, Acci, Ray, Rais, Lana, Asdar, Rhido, Aam, Fikar, Ayu, Faya, Wiwiek, Icha, Luli, Dyan, Ria, Mucha, dan Ocy. Terima kasih atas kebersamaan yang telah kita lalui bersama, smoga persaudaraan kita tetap terjaga.

12. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) FISIP UNHAS.

13. Keluarga besar KKN UNHAS Gel.82 khususnya Kabupaten Wajo, Kecamatan Gilireng, Desa Abbatireng Bapak H.Sampeali (Kepala Desa Abbatireng) beserta keluarga Pung Gusti, Pung Sukma, Pung Bau, Mama Lulu, Lulu, Intan dan seluruh warga Desa Abbatireng yang tidak sempat penulis

sebutkan satu persatu. Terkhusus untuk saudara-saudaraku di Posko Desa Abbatireng, Kak Topan, Echa, Insani, Gufran, Iche, Titik, dan Lucy. Terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya selama penulis menjadi peserta KKN.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan untuk seseorang yang sudah sangat mendukung dan membantu penulis selama ini, Bunot. Terima kasih atas motivasi dan dukungannya selama proses penelitian. Semoga langkah kita selalu di ridhoi Allah SWT.

Serta kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, semoga Allah membalas semua kebaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara (i).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran terhadap skripsi ini agar dikemudian hari penulis dapat membuat tulisan dan karya ilmiah yang lebih baik.

Makassar, 4 Desember 2013

KASWAN TRY POETRA

ABSTRAKSI

KASWAN TRY POETRA, Nim E11109009, dengan judul “Perbandingan Rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat Terhadap Caleg DPRD Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Polewali Mandar” di bawah bimbingan Dr. Gustiana A. Kambo.M.Si sebagai pembimbing I, dan A. Naharuddin, S.IP, M.Si sebagai pembimbing II

Salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik yang bertujuan untuk menjaring caleg-caleg internal yang potensial dan memiliki kualitas, pada setiap daerah pemilihan untuk bersaing dan dipilih oleh rakyat pada sistem pemilu. Caleg yang terpilih pada pemilu akan mewakili rakyat di parlemen dan menjadi penyambung aspirasi masyarakat. Dalam hal ini partai politik bertanggung jawab untuk mencari wakil rakyat yang berkualitas dan benar-benar bekerja demi kepentingan masyarakat. PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat merupakan partai besar yang ada di Indonesia dan Kab. Polewali Mandar, memiliki fungsi untuk menjaring caleg yang terbaik yang dimiliki kedua partai ini untuk dipilih oleh rakyat sebagai wakil ditingkat legislatif. Oleh karena penulis menfokuskan untuk meneliti perbandingan pola rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat terhadap caleg DPRD pemilu tahun 2014 di Kab. Polewali Mandar.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mencari hubungan-hubungan baru yang terdapat pada suatu masalah yang luas dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dengan cara menggali informasi dari sebuah masalah, dalam hal ini membandingkan pola rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pola rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat terhadap caleg DPRD pemilu tahun 2014 di Kab. Polewali Mandar hampir sama, dimana pola rekrutmen yang diterapkan kedua partai ini dimulai dari pendaftaran bakal calon legislatif, Seleksi tahap I (Seleksi Berkas) dan Seleksi tahap II yang dilakukan oleh DPP masing-masing partai. Dalam merekrut caleg, PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat juga lebih memprioritaskan kader internal partainya namun tidak menutup kemungkinan PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat untuk merekrut caleg dari pihak eksternal partai.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Abstraksi

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Partai Politik	12
2.2. Klasifikasi Partai Politik	14
2.3. Rekrutmen Politik	17
2.4. Kerangka Pikir	28
2.5. Kerangka Skema	32

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe dan Dasar Penelitian	33
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.3. Pemilihan Informan dan Unit Analisis	34
3.4. Jenis dan Sumber Data	35

1. Data Primer	35
2. Data Sekunder	35
3.5. Teknik Pengumpulan Data	36
1. Wawancara	36
2. Studi Pustaka dan Dokumen	36
3.6. Teknik Analisi Data	37

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Polewali Mandar	38
4.2. Gambaran Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	41
1. Profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	41
2. Visi dan Misi	41
3. Platform PDI-Perjuangan	43
4.3. Gambaran Umum Partai Demokrat	46
1. Profil Partai Demokrat	46
2. Visi dan Misi	47

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Pola Rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat Terhadap Caleg DPRD Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Polewali Mandar	50
1. Pola Rekrutmen PDI-Perjuangan	50
2. Pola Rekrutmen Partai Demokrat	57
5.2. Perbandingan Rekrutmen PDI-Perjuangan dan	

Partai Demokrat Terhadap Caleg DPRD Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Polewali Mandar	63
---	----

BAB VI. PENUTUP

6.1. Kesimpulan	69
6.2. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (menurut UU No.3 Tahun 1999 tentang pemilu). Dimana pemilu adalah suatu proses para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, yang di mana jabatan tersebut beraneka-ragam mulai dari pemilihan presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Tujuan pemilu adalah sebagai sarana pelaksanaan asas yang menjadi kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila dalam negara Republik Indonesia, adapun tujuan dari pemilu yaitu, terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

Pada sistem demokrasi seperti saat ini, pemilu dilakukan dalam rangka memilih tokoh yang akan menjadi wakil rakyat di dalam pemerintahan, sebab pada era modern seperti saat ini rakyat tidak dimungkinkan untuk mewakili dirinya sendiri di dalam parlemen atau

pemerintahan, oleh sebab itu rakyat harus memilih sosok yang akan menjadi wakilnya di parlemen, partai politik sebagai organisasi yang memiliki fungsi rekrutmen politik sangat dibutuhkan, sebab partai politik adalah satu-satunya organisasi yang boleh berpartisipasi dalam sistem pemilu, karena partai politik memiliki fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan sehingga hanya partai politik-lah yang dapat ikut dalam sistem pemilu dan menempatkan anggota atau kadernya yang terbaik untuk dipilih oleh masyarakat.

Partai politik selain ikut serta dalam proses pemilu, juga merupakan sarana bagi warga negara untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara, dimana partai politik memiliki tujuan untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka menyalurkan aspirasi rakyat. Perkembangan partai politik pertama kali lahir di negara-negara Eropa Barat, hingga saat ini perkembangannya terus melonjak di seluruh dunia dan dinilai masih merupakan alat politik yang paling ampuh untuk mencapai tujuan politik. Sehubungan dengan keberadaan partai politik mengakibatkan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikuti sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.

Beberapa literatur menjelaskan, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir dimana anggotanya mempunyai orientasi,

nilai, dan cita-cita dengan tujuan yang sama. Tujuan bersama ialah untuk merebut tahta atau memperoleh kekuasaan yang biasanya dilakukan dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Keberadaan suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai politik tersebut dalam melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi yang terpenting yang dimiliki partai politik adalah fungsi rekrutmen politik. Seperti yang diungkapkan oleh pakar politik Ramlan Surbakti bahwa Rekrutmen politik mencakup pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.¹

Partai politik memiliki cara tersendiri Untuk melakukan perekrutan calon anggota legislatif, terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural perekrutan yang dilakukan partai politik tersebut. Tidak hanya itu proses rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjangkaran, yang nantinya akan diusung sebagai calon anggota legislatif. Partai politik kali ini dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2014 akan menjalankan salah satu dari fungsi partai Politik yaitu rekrutmen politik, dimana partai politik dalam menghadapi setiap pemilihan umum harus mengajukan nama-nama

¹ Ramlan Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta. Hlm. 113.

calon anggota legislatif (caleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bagian dari tahapan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat. Karena rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi elementer, maka pola dan mekanismenya merupakan salah satu indikasi kualitas, partai Politik yang berkualitas adalah partai politik yang dikelola secara modern berdasarkan kepada mekanisme internal partai yang dijalankan secara konsisten, sehingga prinsip demokrasi dapat berjalan dengan baik. Mekanisme internal ini-lah orang-orang yang memiliki prestasi akan memiliki kesempatan besar untuk direkrut menjadi calon-calon pengisi jabatan politik.

Partai politik yang memiliki fungsi rekrutmen politik berperan besar dalam menghadirkan sosok yang akan menjadi wakil rakyat di parlemen, semakin baik proses rekrutmen yang dilakukan partai politik, maka semakin baik pula tokoh yang akan dihadirkan dalam parlemen, begitupun sebaliknya, semakin jelek proses rekrutmen yang dilakukan maka akan jelek pula tokoh yang akan dihadirkan di parlemen. Jika setiap partai politik sadar akan hal tersebut, maka seharusnya perlemen di Indonesia banyak dipenuhi oleh tokoh yang berkualitas sesuai dengan proses rekrutmen partai, namun sayang sepertinya hal tersebut masih berupa harapan karena masih banyak wakil rakyat di parlemen yang malas bahkan masih banyak yang terlibat kasus korupsi yang pastinya sangat merugikan rakyat.

PDI-Perjuangan dan Partai demokrat boleh dikatakan sebagai partai besar yang memiliki tokoh terbanyak di parlemen, baik di pusat maupun di daerah. Pada proses rekrutmen caleg PDI-Perjuangan, masih ada beberapa yang menjadi kelemahan-kelemahannya, diantaranya adalah proses rekrutmen caleg yang dilakukan belum berjalan sesuai dengan mekanisme yang dikeluarkan partai dan masih tertutupnya proses rekrutmen yang dilakukan. Adapun yang menjadi keunggulan proses rekrutmen caleg, PDI-Perjuangan dalam merekrut caleg lebih memprioritaskan kader internalnya yang lebih berkualitas dan berpengalaman ketimbang mencoba merekrut caleg baru, hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas dan pengalaman yang dimiliki caleg. Berbeda dengan keunggulan proses rekrutmen Partai Demokrat justru berada pada calegnya yang berusia muda dan fresh, hal ini dikarenakan Partai Demokrat memang merekrut caleg-caleg yang berusia muda dan cerdas, namun sama seperti PDI-Perjuangan proses rekrutmen yang dilakukan Partai Demokrat juga terbilang masih tertutup.

Pada Pemilihan Umum legislatif Tahun 2014 diperkirakan akan semakin kompetitif, karena rakyat sudah semakin cerdas dan semakin banyak jumlah kontesannya, partai politik tidak boleh terjebak kepada sikap hanya mengandalkan popularitas calon anggota legislatifnya. Popularitas calon anggota legislatif harus diseimbangkan dengan kapabilitas atau kemampuan yang bersangkutan. Sebab, jika terpilih

nanti, yang bersangkutan memiliki tugas-tugas yang menuntut keunggulan komparatif dan kompetitif di dalam lembaga legislatif yang penuh dengan persaingan, dan oleh karenanya diperlukan kecerdasan intelektual. Sebab, dalam kondisi-kondisi tertentu, pada akhirnya sebuah keputusan harus ditentukan melalui voting. Untuk dapat menghasilkan sebuah keputusan politik yang baik, tentu diperlukan bukan hanya politisi yang memiliki kapasitas gagasan politik yang memadai, tetapi juga kemampuan untuk memenangkan gagasan politik tersebut, sehingga dapat tertransformasi di dalam setiap keputusan yang dihasilkan.

Sebelum calon anggota legislatif diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka partai politik terlebih dahulu melakukan rekrutmen atau penyeleksian terhadap calon anggota legislatif, baik penelitian terhadap persyaratan administrasi yang mencakup legalitas dari penilaian ijazah, kesehatan, maupun keterangan bebas hukum. Selanjutnya partai politik juga wajib melakukan penilaian terhadap moralitas calon anggota legislatif misalnya ketaatan beribadah, kemampuan baca kitab suci serta kecakapan berkomunikasi berdasarkan etika berbahasa. Untuk mempermudah penyeleksian maka partai politik harus melibatkan para ahli yang mengerti tentang bidang-bidang yang dibutuhkan.

Proses rekrutmen politik juga memiliki kelemahan yaitu segala persyaratan pencalonan anggota legislatif tidak disampaikan secara

umum dan terkesan masih tertutup. Selama ini persyaratan yang ditawarkan oleh masing-masing partai untuk menjadi anggota legislatif hanya disampaikan pada tingkat kepengurusan partai saja, sehingga masing-masing calon anggota legislatif mayoritas dipegang oleh orang-orang yang memiliki jabatan di partai, seharusnya persyaratan tersebut dapat disosialisasikan melalui bermacam cara, misalnya melalui pamflet, poster, atau melalui media massa, seperti halnya ketika perusahaan dalam mencari tenaga kerja.

Menurut penulis cara seperti ini akan lebih kompetitif dan demokratis, karena hal ini akan mengundang persepsi masyarakat secara luas bahwa pencalonan anggota legislatif pada partai politik tidak hanya diperuntukkan bagi pengurus partai saja tetapi masyarakat di luar partai juga mempunyai kesempatan untuk ikut berkompetisi dalam proses pencalonan anggota legislatif. Apabila partai politik melakukan rekrutmen politik secara transparan, maka tingkat kompetisi antar calon anggota legislatif akan lebih terlihat agresif, karena nantinya masyarakat akan mampu memilih seorang politisi yang benar-benar dikehendaki. Bagi setiap calon anggota legislatif yang terpilih akan merasa memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap para pemilihnya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat akan melaksanakan rekrutmen caleg khususnya menjelang pemilu tahun 2014, dan akan merekrut caleg yang

berkualitas baik di DPR maupun DPRD yang jauh lebih baik dibandingkan pada pemilu tahun 2009. Pada pemilu 2009 PDI-Perjuangan menggunakan mekanisme penjaringan, penyaringan, dan penetapan yang didasarkan pada pertimbangan dan penilaian kualifikasi kader seperti pemahaman ideologi partai dan kemampuan memperjuangkan ideologi partai yang menjadi kebijakan di parlemen, PDI-Perjuangan kali ini dalam mencari caleg yang lebih berpotensi pada pemilu sebelumnya akan menambahkan mekanisme psikotes. Dari hasil psikotes ini akan digunakan sebagai bahan pembinaan dan penempatan lebih lanjut bagi caleg yang bersangkutan.

PDI-Perjuangan dan partai Demokrat akan merekrut wakil-wakil rakyat dengan menerapkan pola baru dan proses yang lebih ketat, agar dapat memunculkan wakil rakyat terbaik di pemilu tahun 2014 mendatang, juga untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif yang dalam prosesnya terhindar dari praktek kolusi dan nepotisme, sehingga rakyat akan mendapatkan calon legislatif yang berkualitas. Dalam merekrut caleg, PDI-Perjuangan akan lebih memprioritaskan dari kalangan kader internal partai yang telah di didik dan ikut bersama-sama membesarkan partai, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan PDI-Perjuangan untuk merekrut caleg dari kalangan non kader, bahkan PDI-Perjuangan akan mengundang secara khusus

orang-orang yang dinilai layak menjadi caleg PDIP untuk mendaftarkan diri.

Pada pemilu 2014 tidak hanya PDI-Perjuangan saja yang akan merekrut caleg yang berkualitas, tapi semua partai politik yang ada di Indonesia akan mencari dan merekrut caleg yang lebih berkualitas dan akan lebih berpotensi dibanding pada pemilu 2009. Salah satunya yaitu Partai Demokrat yang dimana saat ini menjadi perbincangan baik di TV nasional maupun di media cetak, dikarenakan kader dari Partai Demokrat ada beberapa diantaranya kader partai telah menjadi tersangka dalam kasus korupsi yang mengakibatkan elektabilitas partai jatuh, sehingga membuat masyarakat kecewa akan kinerja partai politik. Akibat dari kasus tersebut masyarakat kurang percaya lagi kepada Partai politik dan caleg yang seharusnya menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

Pemilu 2014 Partai Demokrat akan menerapkan pola rekrutmen caleg yang lebih mengandalkan kualitas, integritas, dan kapasitas caleg bersangkutan yang hampir sama dengan pola rekrutmen yang dilakukan pada pemilu 2009, dimana caleg yang direkrut partai demokrat kebanyakan berasal dari kader internal yang dimana kader tersebut telah di didik dan ikut bersama-sama membesarkan nama partai, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa Partai Demokrat akan merekrut dari kalangan non kader yang memiliki keilmuan juga, kemampuan yang khusus atau memiliki ketokohan di tengah-tengah

masyarakat. Hal ini disesuaikan dengan fungsi partai politik yang pada dasarnya rekrutmen politik, yaitu proses yang dilakukan oleh partai politik dalam mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik termasuk pada proses pemilihan umum. Selain itu, rekrutmen politik yang diarahkan pada generasi muda potensial menjadi sarana untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di dalam struktur partai politik.

Sejauh ini PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat telah menerapkan pola rekrutmen yang cukup baik untuk menghasilkan caleg-caleg yang berkualitas, dan telah terpilih menjadi wakil rakyat pada pemilu tahun 2009. Berdasarkan permasalahan dari latar belakang diatas, khususnya menyangkut tentang pola rekrutmen politik, maka penulis akan membahas mengenai salah satu fungsi dari partai politik dengan judul; *Perbandingan Rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat Terhadap Caleg DPRD Pemilu tahun 2014 di Kabupaten Polewali Mandar.*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pola rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat terhadap caleg DPRD pemilu tahun 2014 di Kabupaten Polewali Mandar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan pola rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat terhadap caleg DPRD pada pemilu tahun 2014 di Kabupaten Polewali Mandar.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai perbandingan rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat terhadap caleg DPRD pemilu tahun 2014 di kabupaten polewali mandar.

2. Manfaat Praktis

Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang terkait dengan pola rekrutmen partai politik menjelang pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten Polewali Mandar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam pembahasan ini akan menjelaskan enam aspek dan beberapa teori pendukung yang membantu dalam penulisan skripsi ini. Keenam aspek dan beberapa teori pendukung itu nantinya digunakan sebagai bahan untuk mengkaji lebih dalam masalah-masalah yang terkait pola rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat terhadap caleg DPRD pemilu tahun 2014 di Kabupaten Polewali Mandar.

2.1. Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu sarana penting penyaluran aspirasi masyarakat, dan sebagai kendaraan politik, yang pada umumnya ada pada negara-negara berdaulat serta merdeka. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikuti sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Partai politik pada umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau sedang dalam proses memodernisasikan diri. Penelitian mengenai partai politik merupakan kegiatan ilmiah yang relatif baru, namun telah bermacam-macam penelitian telah diadakan untuk mempelajarinya dari penelitian-penelitian tersebut telah banyak definisi tentang partai politik dari pakar-pakar politik.

Menurut Miriam Budihardjo partai politik secara umum dapat dikatakan sebagai suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka, baik dengan cara konstitusional maupun inkonstitusional.²

Menurut Carl J. Friedrich dalam bukunya yang berjudul *"Constitutional and Democracy: Theory and Practice in Europe and America"*, mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material.³

Joseph Lapalombara dan Myron Weiner, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budihardjo melihat partai politik sebagai organisasi untuk mengekspresikan kepentingan ekonomi sekaligus mengapresiasi dan mengatur konflik. Partai politik dilihat sebagai organisasi yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan serta secara

² Miriam Budihardjo, *op. cit.*, hal 160

³ *Ibid*, hal 161

organisatoris memiliki cabang mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.⁴

Arifin Rahman mengasosiasikan partai politik sebagai organisasi perjuangan, tempat seseorang atau kelompok mencari dan memperjuangkan kedudukan politik dalam negara. Bentuk perjuangan yang dilakukan oleh setiap partai politik tidak harus menggunakan kekerasan atau kekuatan fisik, tetapi melalui berbagai konflik dan persaingan baik internal partai maupun antar partai yang terjadi secara melembaga dalam partai politik pada umumnya.⁵

A. A Said Batara & Moh. Dzulkiah mengemukakan dalam perspektif sosiologi politik, bahwa partai politik merupakan kumpulan dari sekelompok orang dalam masyarakat yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan suatu pemerintahan atau negara. Adapun dalam ilmu politik, istilah partai politik biasa disebut sebagai suatu kelompok yang terorganisir anggota-anggotanya yang mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama.⁶

2.2 Klasifikasi Partai Politik

Partai politik juga telah terdiferensiasi berdasarkan tipologinya atau klasifikasi. Klasifikasi itu dapat diketahui dari tiga dasar kriteria,

⁴ Joseph Lapalombara dan Myron Weiner, *"Political Parties and Political Development"*, Princeton UP, Princeton, 1966

⁵ Arifin Rahman, *"Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional"*, SIC Surabaya, 2002, hal 91

⁶ A.A. Said Batara & Moh. Dzulkiah Said, *"Sosiologi Politik; Konsep & Dinamika Perkembangan Kajian"*, C.V Pustaka Setia, Bandung, 2007, hal 221

yaitu asas dan orientasi, komposisi dan fungsi, serta basis tujuan dan sosial.⁷ Dari sisi asas dan orientasi, parpol dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu :

1. Parpol pragmatis, yaitu suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu.
2. Parpol doktriner, ialah suatu parpol yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologinya.
3. Parpol kepentingan merupakan suatu parpol yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

Jika melihat klasifikasi partai politik berdasarkan asas dan orientasinya, PDI-Perjuangan merupakan tipe partai pragmatis karena dapat dilihat bahwa PDI-Perjuangan memiliki program-program dan kegiatan yang tidak terlihat kaku pada satu doktrin atau ideologi tertentu. Program dan kegiatan PDI-Perjuangan cenderung merupakan cerminan dari program-program yang disusun oleh pimpinan dan berdasarkan gaya kepemimpinan ketuanya. Sama seperti PDI-Perjuangan, Partai Demokrat juga merupakan partai pragmatis karena orientasi Partai Demokrat juga tidak terikat pada doktrin atau ideologi tertentu dengan program kerja cenderung

⁷ *Ibid*, hal 228

merupakan cerminan dari gaya kepemimpinan ketua umum yaitu SBY.

Berdasarkan komposisi dan fungsinya, parpol dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu :

1. Partai massa, adalah parpol yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota (kuantitas) dengan cara mobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi kelompok dalam masyarakat.
2. Partai kader, adalah suatu parpol yang mengandalkan kualitas anggota, kedekatan organisasi, disiplin anggota sebagai kekuatan utama.

Jika dilihat dari komposisi dan fungsinya PDI-Perjuangan dapat di golongkan partai massa karena PDI-Perjuangan merupakan partai yang mengandalkan kekuatan utamanya yaitu jumlah anggota atau massa yang cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, dengan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi kelompok masyarakat PDI-Perjuangan menyatakan diri sebagai partai Wong Cilik atau partai pelindung bagi masyarakat kelas menengah kebawah. Adapun komposisi dan fungsi dari Partai Demokrat juga di golongkan menjadi partai massa karena Partai Demokrat sebagai salah satu partai besar memiliki jumlah massa yang cukup banyak karena Partai Demokrat lebih menekankan untuk memperbanyak jumlah keanggotaan dan menyusun basis pemilu yang lebih luas di daerah Polewali Mandar, ini

lah yang membuat Partai Demokrat salah satu partai yang memiliki basis massa terbanyak di Kab. Polewali Mandar yang menjadi pemenang kedua pada Pemilu tahun 2009 di Kab. Polewali Mandar.

Berdasarkan basis sosial dan tujuannya, parpol dapat digolongkan menjadi 4 tipe, yaitu :

1. Parpol yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah.
2. Parpol yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti buruh, petani, dan pengusaha.
3. Parpol yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu (religi), seperti Islam, Kristen, Hindu, dll.
4. Parpol yang anggotanya berasal dari budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu.

Dilihat dari basis sosial dan tujuannya PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat merupakan partai politik yang beranggotakan lapisan sosial dalam masyarakat, hal ini dilihat dari anggota partainya yang terdiri dari masyarakat kelas atas sampai kelas bawah dan anggotanya tidak terikat pada agama dan budaya tertentu.

2.3. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik secara umum diartikan sebagai suatu proses dimana lembaga menempatkan aktor-aktor pada suatu posisi tertentu, mengambil tempat sehingga terlibat dalam lembaga tersebut. Proses melalui suatu lembaga organisasi mengangkat orang berbakat yang

dianggap mampu menduduki suatu posisi atau jabatan yang ada, sehingga yang bersangkutan dapat berpartisipasi secara langsung dalam setiap kegiatan organisasi yang berorientasi kepada kualitas dan kuantitas anggota serta menghidupkan regenerasi untuk eksistensi organisasi. Jadi, apabila kata rekrutmen menambahkan kata politik dibelakangnya, maka akan merujuk pada suatu proses dimana partai politik mengangkat aktor dan menempatkan pada posisi atau jabatan tertentu, baik pada infrastruktur maupun pada suprastruktur politik, sehingga yang bersangkutan terlibat dalam proses kehidupan politik.

Miriam Budiardjo, mendefinisikan rekrutmen politik sebagai proses melalui mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.⁸Dari definisi yang diungkapkan di atas dapat tergambar bahwa Miriam Budiardjo lebih menekankan proses rekrutmen politik ditempuh sebagai upaya mencari anggota baru dengan maksud menjaga kelangsungan hidup partai. Proses rekrutmen dalam model ini memang akan kelihatan lebih terletak pada faktor kuantitatifnya, dengan merekrut sebanyak-banyaknya orang atau kelompok untuk menjadi anggota partai. Penyeleksian anggota baru ini berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan proses-proses dalam partai politik dan kelangsungan kegiatan dalam partai politik tersebut. Proses

⁸ Miriam Budiardjo. 1981. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta. Hlm. 16

rekrutmen politik ini juga bertujuan untuk menyiapkan calon-calon pemimpin masa mendatang. Mereka diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan partai politik tersebut.

Menurut Rush & Althof, rekrutmen atau perekrutan adalah proses dua arah, dikarenakan individu-individunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan, atau mungkin di dekati oleh orang lain kemudian menjadi pejabat pada posisi tertentu. Dengan cara yang sama, perekrutan itu bisa disebut formal jika para individu direkrut dengan terbuka melalui cara prosedural atau institusional berupa seleksi atau pemilihan. Rekrutmen disebut informal jika para individunya di rekrut secara private atau dibawah tangan tanpa melalui atau sedikit sekali melalui cara institusional.

Pengertian Rekrutmen Politik menurut Rush & Althof yang menjabarkan mengenai rekrutmen terbuka, namun dalam pembahasan di atas belum menjelaskan secara spesifik mengenai rekrutmen terbuka. Dalam melengkapi konsep rekrutmen ini Almond & Powell memiliki konsep rekrutmen yang lebih terperinci. Rekrutmen Politik menurut Almond dan Powell adalah suatu proses dimana terjadi penseleksian calon-calon masyarakat yang dipilih untuk menempati kursi-kursi penting di dalam peranan politik, termasuk dalam jabatan birokrasi dan jabatan administrasi.

Teori Almond dan Powell prosedur-prosedur rekrutmen politik terbagi dalam dua bagian yaitu:⁹

1. *Prosedur tertutup* artinya rekrutmen dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Sehingga prosedur ini dianggap prosedur tertutup karna hanya ditentukan oleh segelintir orang
2. *Prosedur terbuka* artinya setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin didalam negaranya serta pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka, dan terang-terangan. Dikenal dengan istilah LUBER : Langsung Umum Bebas dan Rahasia, JURDIL : Jujur dan Adil. Di dalam rekrutmen politik juga dikenal istilah jalur-jalur politik yang perlu kita ketahui secara luas kajian-kajiannya antara lain:
 - a. *Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu* artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan,

⁹ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005) hal.200-203

bakat-bakat yang terdapat didalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik. Semua faktor-faktor tersebut perlu kita kaji dan pahami karena tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Kita harus mempunyai skill, kecakapan, keahlian untuk terjun kedalam dunia politik. Karena dunia politik merupakan dunia yang keras penuh persaingan taktik dan teknik. Bukan sembarang orang mampu direkrut untuk masuk kedalam dunia politik. Orang-orang tersebut terpilih karena memang memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang dianggap mampu menguntungkan negara maupun memberi keuntungan partai-partai tertentu.

b. Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi artinya setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu membawa/memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu tujuan dari terbentuknya suatu partai politik yang perlu kita ketahui. Seperti yang terangkum didalam teori Almond dan G.Bigham powell menjelaskan “rekrutmen politik tergantung pula terhadap proses penseleksian didalam partai politik itu sendiri”. Jadi kesimpulanya setiap individu harus mempunyai skill yang

mampu diperjualbelikan sehingga mampu menempati jabatan-jabatan penting suatu negara.

- c. *Jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial.* Dizaman modern ini jalur rekrutmen promodial tidak menutup kemungkinan terjadi di dunia politik. Fenomena itu terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara orang-orangan yang memiliki jabatan politik sehingga ia mampu memindahtangankan atau memberi jabatan tersebut kepada kerabat terdekatnya yang dianggap mampu dan cakap dalam mengemban tugas kenegaraan. Fenomena ini dikenal dengan nama “rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial”. Contoh jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial: seorang raja ketika wafat akan menyerahkan segala kekuasaannya kepada anak-anaknya, kekuasaan yang diberikan kepada keluarga besan, ketika perkawinan menantu lelaki yang diberi jabatan penting oleh mertuanya, karena memiliki persamaan marga atau suku seseorang mendapat jabatan dari sesama marga atau sukunya.

Prosedur rekrutmen terbuka dan tertutup Almond & Powell masih dalam konteks rekrutmen politik yang lebih luas, kemudian oleh Suharno rekrutmen politik ini lebih di persempit dalam konteks partai politik. Suharno menyatakan rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk

partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik.¹⁰ Ada dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup. Dalam model rekrutmen terbuka, semua warga negara yang memenuhi syarat tertentu mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara/pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai pemenangnya. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat atau yang dikenal sebagai platform politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya. Sebaliknya, dalam sistem rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri.

Sistem rekrutmen politik yang dilaksanakan oleh setiap partai politik yang berada di negara-negara penganut paham demokrasi akan berbeda dengan yang dilaksanakan oleh partai politik di negara penganut paham komunis. Sementara di dalam suatu negara demokrasi itu sendiri mungkin akan berbeda satu sama lain, dalam

¹⁰Inu Kencana, Syafie, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Pustaka RekaCipta, 2009), hal. 58

pelaksanaannya tentu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial atau subsistem yang ada di dalam negara tersebut.

Partai politik di negara penganut paham demokrasi akan memberikan kesempatan besar kepada seluruh warga negara untuk ikut berpartisipasi menjadi anggota partai politik, dan juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkompetisi agar dapat terpilih menjadi orang yang dicalonkan sebagai pemimpin. Bagi warga negara yang mempunyai kemampuan yang menonjol, kemungkinan dirinya dapat terpilih sebagai pemimpin yang dicalonkan apabila dibandingkan dengan warga negara yang mempunyai kemampuan yang kurang atau tidak menonjol sama sekali. Akan tetapi kesempatan yang diberikan kepada warga negara tetap sama, tapi yang membedakan adalah besar kecilnya kesempatan untuk dapat terpilih (direkrut).

Demikian pula partai politik di negara-negara penganut paham komunis, maka fungsi rekrutmen politik dilaksanakan dengan mengutamakan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk mengabdikan kepada partai yang menguasai ideologi partai tersebut. Untuk itu calon anggota harus menjalani masa percobaan di mana dia harus memenuhi standar-standar ketat mengenai pengabdian dan kelakuan, baik pribadi maupun di muka umum yang ditetapkan oleh partai. Proses rekrutmen politik memiliki beberapa tahap, yaitu tahap pertama adalah mencari anggota baru. tahap kedua adalah

mengkader anggota, dan tahap ketiga adalah menyeleksi anggota/ kader untuk direkrut dalam jabatan-jabatan politik atau administrasi.

Di Indonesia, pemilihan umum merupakan kesempatan bagi pengurus yang dianggap mampu untuk mewakili partainya di dalam lembaga legislatif dan mengikuti proses pengambilan keputusan. Partai politik yang ingin mengikuti atau menjadi peserta pemilu terlebih dahulu menyeleksi dan memilih orang yang berbakat dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi calon dengan mewakili partainya dalam pemilu. Untuk mempertahankan suatu jabatan, maka partai politik tersebut harus menampilkan orang-orang yang memiliki kemampuan bercakap atau keahlian khusus dan mempunyai pengaruh dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya pemilih. Sistem demokrasi yang sudah mapan, para tokoh politik yang direkrut terdiri dari orang-orang dengan latar belakang keahlian tertentu, seperti ; organisatoris, pengusaha, dan bahkan individu yang memiliki pengaruh tertentu dalam suatu wilayah.

Pola rekrutmen politik mengalami perkembangan sejalan dengan berkembangnya kualitas kehidupan sosial politik masyarakat. Banyaknya pola rekrutmen politik secara alamiah, dimana calon-calon kader partai politik yang akan direkrut, diseleksi berdasarkan keterlibatan dan aktifitas mereka sehari-hari dalam dunia politik. Kehidupan bernegara, keberadaan partai politik/ organisasi kekuatan sosial politik sangat diperlukan baik di negara bercorak pemerintahan

demokrasi maupun dengan sistem totaliter. Hampir semua negara mempunyai suatu organisasi sosial politik yang merupakan pilar utama infra struktur politik dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Setiap sistem politik telah mengatur atau pemilihan atas pejabat/ pegawai negeri untuk jabatan politik dan administrasi. Di negara demokrasi semacam Amerika, Inggris, Prancis, posisi politik secara formal terbuka untuk calon yang dengan kemampuan handal. Namun rekrutmen politik, seperti peserta politik cenderung pada masyarakat dengan latar belakang kelas menengah atau kelas atas, dan yang biasanya terdapat dari kelas lebih rendah dapat mencapai masuk melalui jalur pendidikan.

Rekrutmen politik, kepemimpinan politik dan pemerintahan, khususnya oleh masyarakat modern yang telah mengenal lebih dalam tentang teknologi membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk meraih suatu jabatan dibandingkan melalui pendidikan atau pelatihan. Pengalaman secara alamiah dalam suatu kesatuan perdagangan dalam masyarakat kooperatif biasa dibatasi tingkatannya, dengan menempatkan pendidikan formal. Bahkan partai politik golongan kiri, pejabat dengan golongan lebih tinggi cenderung dipegang oleh orang-orang profesional yang berlatar belakang pendidikan dibandingkan kelas pekerja.

Paparan di atas memperlihatkan eksistensi dari proses rekrutmen politik sebagai salah satu instrumen yang sangat penting

dalam sistem politik. Partai politik mempunyai fungsi khusus dalam mendukung sistem politik dan fungsi partai politik itu sendiri mempunyai berbagai macam variasi bagian dari pendapat beberapa sarjana ilmu politik. Pelaksanaan rekrutmen politik yang dilakukan oleh elit-elit politik dari sudut politis akan memberikan pengaruh terhadap kebijaksanaan politik khususnya penempatan anggota dalam badan legislatif yang akan berfungsi sebagai decision maker (pengambilan keputusan). Adapun dalam hal rekrutmen individu atau kelompok masyarakat akan menguntungkan dari sudut administrasi. Karena hal ini akan memberikan kontinuitas bagi pelaksanaan proses kerja di dalam gerak dan perjalanan partai politik guna melanjutkan regenerasi secara berkala. Adapun rekrutmen politik kepada tingkat yang lebih rendah akan sangat membantu proses penggalangan massa ditingkat regional yang lebih kecil. Dalam hal ini tentunya akan sangat membantu partai politik dalam mengumpulkan suara massa atau simpatisan untuk mengikuti pemilu.

Rekrutmen Politik sangat ditentukan oleh berbagai proses yang ada di dalamnya, seperti mekanisme ataupun kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam pelaksanaan rekrutmen tersebut. Dalam proses pemilihannya pun ada berbagai macam yang dilakukan, seperti teknis seleksi, undian atau lainnya, dilaksanakan oleh partai politik yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dimana proses rekrutmen politik dilaksanakan. Pada hakekatnya hasil rekrutmen politik menentukan

mekanisme politik dalam suatu sistem politik, baik itu dalam skala nasional maupun lokal/ daerah. Konsep ini menunjukkan bahwa rekrutmen politik sangat menentukan arah dari kebijaksanaan politik suatu partai politik. Dalam seleksi penentuan kebijaksanaan elit politik, orang-orang yang direkrut untuk menduduki posisi yang lebih tinggi/ kedudukan tingkat atas. Masalah pemilihan individu-individu untuk mengisi jabatan penentu keputusan tingkat atas adalah merupakan hal yang urgen karena di dalamnya menyangkut proses mempertahankan posisi dalam struktur.¹¹

Pemaparan di atas menyebutkan rekrutmen politik dimaksudkan untuk menyeleksi kader-kader yang akan diposisikan ke dalam berbagai struktur lembaga khususnya lembaga legislatif merupakan salah satu fungsi yang esensial bagi sebuah partai politik. Seiring berjalannya mekanisme yang jelas tentu akan memunculkan kader-kader yang berkualitas pula.

2.4. Kerangka Pikir

Dari pemaparan yang ada di atas, penulis akan lebih fokus untuk memandang proses rekrutmen politik, khususnya rekrutmen politik PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat. Menurut Ramlan Subakti, bahwa proses rekrutmen politik sebagai sarana menyeleksi dan menyiapkan kader-kader partai yang nantinya akan mengambil

¹¹ <http://www.ardee.web.id/Definisi,FungsidanKelemahanPartaiPolitik.htm>

peranan dalam sistem politik. Sistem politik yang dimaksudkan mencakup lembaga-lembaga politik yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif baik dalam skala nasional maupun dalam kewilayahan. Hal tersebut didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka tetap eksisnya partai dibutuhkan seorang kader yang disamping mengakar dan dapat diterima dalam masyarakat juga dituntut memiliki kemampuan dan kualitas untuk menduduki posisi-posisi strategis di dalam lembaga-lembaga politik. Untuk dapat mendudukkan calegnya di tataran pemerintahan, setiap partai politik wajib bersaing untuk memikat hati dan suara masyarakat di setiap daerah pemilihan.

Pada perkembangan selanjutnya, realitas sosial tiap daerah akan menuntun proses rekrutmen suatu partai politik, dengan mengedepankan norma-norma tertentu. Norma-norma yang dimaksud adalah bentuk budaya politik lokal yang terbangun dalam tiap masyarakat suatu wilayah. Untuk konteks Indonesia dengan akar budaya kolusi dan nepotisme yang amat kokoh, juga mempengaruhi proses rekrutmen partai. Rasionalitas masih berada pada urutan kedua dari segala bentuk rekrutmen, termasuk juga rekrutmen kader yang akan diusung untuk mengikuti pemilihan umum. Tidak heran jika ada banyak keluarga dari para pejabat yang turut terdaftar sebagai calon legislatif pada setiap pemilu legislatif dilaksanakan.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa untuk mempertahankan eksistensi sebuah partai politik, maka setiap partai politik wajib

melakukan proses rekrutmen kader/ caleg, hal ini dilakukan agar komponen di dalam partai terjadi peremajaan. Ibarat sebuah daun menguning, yang akan di gantikan dengan tunas daun baru. Dalam hal ini penulis mencoba untuk meneliti pola rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat juga mencoba menggambarkan perbandingan dari proses rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat. Dimana kedua partai ini merupakan partai besar yang ada di Indonesia dan di Kabupaten Polewali Mandar salah satunya, sehingga sangat menarik untuk melihat bagaimana pola rekrutmen caleg dari kedua partai ini pada pemilu 2014, sebab proses rekrutmen caleg akan mempengaruhi kualitas caleg yang akan dipasang untuk bersaing pada pemilu legislatif. Semakin berkualitas caleg yang dimiliki tentu akan semakin memberikan peluang besar bagi partai untuk memperoleh jumlah suara yang semakin banyak.

Pada pemilu tahun 2014, dapat dikatakan bahwa pola rekrutmen yang digunakan oleh PDI-Perjuangan dan Partai demokrat tidak jauh berbeda, sebab pola rekrutmen yang diterapkan kedua partai ini merupakan pola rekrutmen yang tidak jauh berbeda pada pemilu tahun 2009. PDI-Perjuangan dan Partai demokrat sama-sama lebih memprioritaskan kader internal partai mereka ketimbang merekrut caleg dari eksternal partai, hal ini dilakukan untuk memperoleh caleg-caleg yang lebih berkualitas dengan mengandalkan hasil binaan partai sendiri, namun hal ini tidak menutup kemungkinan

jika kedua partai ini akan membuka lowongan bagi pihak luar partai yang ingin berpartisipasi dalam proses perekrutan caleg dan untuk memenangkan partai pada pemilihan umum. Namun, meskipun demikian rekrutmen yang dilakukan kedua partai tidak bisa dikatakan sama, sebab pasti kedua partai tersebut memiliki kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahannya masing-masing, inilah yang kemudian akan menjadi pembeda dan menjadi bahan perbandingan proses rekrutmen kedua partai tersebut.

2.5. Kerangka Skema

Bertitik tolak dari semua pemikiran di atas, maka untuk menyamakan persepsi terhadap permasalahan yang akan dikemukakan, akan digambarkan skema berpikir sebagai berikut :

